

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DALAM
PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) TAHUN 2019 - 2022**

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh :

FIKRI JULIANSYAH SAPUTRA

1910833005



DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

202

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dan menganalisis tentang strategi yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi dalam pemberdayaan PMKS tahun 2019 – 2022. PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial memiliki 26 kategori, akan tetapi di Kota Bukittinggi angka fakir miskin sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Angka fakir miskin dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi dengan jumlah rekor pada tahun 2019 dengan angka 5742 jiwa, tahun 2020 dengan 5231 jiwa, dan tahun 2021 sebanyak 4977 jiwa.. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus, pemilihan informan secara *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan Teori Actors yang dikemukakan Sarah Cook dan Steve Macaulay. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa strategi yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi dalam pemberdayaan PMKS yaitu : Menetapkan dan menjalankan Perda Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaan Kesejahteraan Sosial. Melaksanakan berbagai pelatihan untuk menciptakan rasa percaya diri dan kompetensi dalam diri PMKS. Melaksanakan bimbingan mental, spiritual dan sosial untuk menimbulkan keyakinan PMKS untuk berubah. Memberikan kesempatan terhadap PMKS seperti Rehabilitasi sosial, pemberdayaan dan jaminan sosial serta bantuan dan program pelatihan. Memberikan tanggung jawab terhadap pemberdayaan PMKS yang bisa dilihat dari penurunan angka PMKS dan capaian SPM bidang sosial yang mencapai 100% dan Memberikan dukungan seperti dukungan dana dana melalui APBD, bantuan sosial dari pusat, dan membuat pelatihan dan bimbingan sesuai kebutuhan masyarakat

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, Pemerintah, Fakir Miskin.



ABSTRACT

This research discusses and analyzes the strategies carried out by the Bukittinggi City government in empowering PMKS in 2019 - 2022. PMKS or People with Social Welfare Problems have 26 categories, however in Bukittinggi City the number of poor people has been very high in recent years. The number of poor people in recent years has been quite high with a record number in 2019 with 5742 people, in 2020 with 5231 people, and in 2021 with 4977 people. The approach in this research is qualitative with a case study method, selecting informants using purposive sampling. This research uses Actors Theory proposed by Sarah Cook and Steve Macaulay. The research results show that there are several strategies carried out by the Bukittinggi City government in empowering PMKS, namely: Establishing and implementing Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning the Implementation of Social Welfare. Carrying out various trainings to create a sense of self-confidence and competence in PMKS. Carry out mental, spiritual and social guidance to give PMKS confidence to change. Providing opportunities for PMKS such as social rehabilitation, empowerment and social security as well as assistance and training programs. Providing responsibility for empowering PMKS which can be seen from the decline in PMKS numbers and SPM achievements in the social sector which reached 100% and providing support such as financial support through the APBD, social assistance from the center, and providing training and guidance according to community needs

Keywords: Strategy, Empowerment, Government, Poor.

